

# Dialog

Vol. 40, No. 1, Juni 2017

## Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan

ISSN : 0126-396X

### **PENANGGUNGJAWAB**

Prof. H. Abdurrahman Mas'ud, Ph.D.

### **MITRA BESTARI**

Prof. Mark Woodward (Australian National University)

Prof. Robert Hefner (Boston University)

Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, M.A. (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Prof. Dr. Muhammad Hisyam (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

Prof. Dr. Masykuri Abdillah, M.A. (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar, M.A. (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Prof. Dr. Iik Arifin Mansurnoor (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Saiful Umam, Ph.D. (Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

### **PEMIMPIN REDAKSI**

Dr. H. Rohmat Mulyana Sapdi

### **WAKIL PEMIMPIN REDAKSI**

Drs. H. Hefson Aras, M.Pd.

### **SEKRETARIS REDAKSI**

Rahmatillah Amin, S.Kom.

### **DEWAN REDAKSI**

Dr. H. Muhammad Adlin Sila, M.A. (Balai Litbang Agama Jakarta)

Prof. Dr. H. Imam Tholikhah (Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan)

Dr. Hayadin, M.Pd. (Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan)

Dr. H. Zainuddin Daulay (Puslitbang Kehidupan Keagamaan)

Dr. Acep Arifudin (Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi)

Lukmanul Hakim (LaKIP Jakarta)

### **SEKRETARIAT REDAKSI**

Heny Lestari, S.Pd.

Dra. Siti Atieqoh, M.Pd.

Wawan Hermawan, S.Kom.

Dewi Indah Ayu D., S.Sos.

Sri Hendriani, S.S.i.

### **SETTING LAYOUT & DESAIN GRAFIS**

Abas, M.Si.

Rizky Riyadu Taufiq, MA.

### **REDAKSI DAN TATA USAHA**

Sekretariat Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Jl. M.H. Thamrin No. 6, Jakarta Pusat – Telp./Fax. (021) 3920688 – 3920662

e-mail : [sisinfobalitbangdiklat@kemenag.go.id](mailto:sisinfobalitbangdiklat@kemenag.go.id)

Jurnal Dialog diterbitkan satu tahun dua kali, pada bulan Juni dan Desember oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Jurnal Dialog sebagai media informasi dalam rangka mengembangkan penelitian dan kajian keagamaan di Indonesia. Jurnal Dialog berisi karya tulis ilmiah, hasil kajian dan penelitian sosial keagamaan. Redaksi mengundang para peneliti agama, cendekiawan dan akademisi untuk berdiskusi dan menulis secara ilmiah demi pengembangan penelitian maupun kajian sosial keagamaan di Indonesia dalam Jurnal DIALOG ini.

## PENGANTAR REDAKSI

---

Jurnal Dialog edisi kali ini menampilkan beberapa tulisan yang berkaitan dengan isu-isu demokrasi, khilafah, konflik Tolikara di Papua, dialog fikih dan budaya, madrasah unggulan, pengaruh kompetensi guru dalam bidang pembelajaran Bahasa Arab, dan strategi pembacaan teks untuk meningkatkan kepekaan sosial anak.

Ide-ide yang dipaparkan dalam tulisan-tulisan ini merupakan isu-isu yang akrab dengan pembaca dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini karena isu-isu tersebut menjadi bagian yang penting dalam diskursus keislaman di Indonesia. Meskipun beberapa isu seperti kompatibilitas demokrasi dan Islam, dialog fikih dan budaya serta madrasah unggulan misalnya cukup banyak didiskusikan dari waktu ke waktu. Namun demikian, isu-isu tersebut tetap memiliki daya tarik untuk kembali diperbincangkan terutama tentunya bila diskursus tersebut didekati dari sudut pandang akademis yang memiliki argumentasi dan pendekatan yang berbeda beda.

Dalam *Kompatibilitas Islam dan Demokrasi*, Ana Sabhana mencoba untuk menelaah pandangan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) tentang kompatibilitas Islam dan Demokrasi. Tulisan ini mencoba menjawab dua hal penting yaitu: bagaimana pandangan HTI sebagai kelompok fundamentalis terhadap kompatibilitas Islam dan demokrasi? Kedua; apakah pada kenyataannya Islam kompatibel dengan demokrasi? Tulisan ini dapat memberikan pandangan penting terkait hubungan HTI dan Islam serta hubungan HTI dengan pemerintah. Meskipun HTI selama ini dianggap sebagai organisasi Islam yang tidak melakukan tindakan radikal pada negara secara praktis dan tetap dalam koridor wacana, namun dapat dicermati bahwa radikalisasi pemikiran dalam memandang keabsahan eksistensi negara dalam Islam ada pada pemikiran HTI. Radikal dalam hal ini memang tidak dapat dilihat hanya pada tindakan, pemikiran radikal seringkali tidak diikuti oleh tindakan, namun ia dapat menjadi pemicu bagi tindakan radikal dikemudian hari ketika ada peluang. Dalam kaitan ini, tulisan Ana dapat memberikan gambaran mengapa dalam

konteks bernegara di Indonesia HTI penting dicermati, karena ketika menyinggung keabsahan negara dan Islam, tidak dapat dilepaskan dari peran umat Islam sebagai bagian utama dalam pendirian negara dan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya tulisan Mustolehudin tentang konflik Islam dan Kristen perihal pendirian gereja Sragen pasca konflik yang terjadi di Tolikara juga menjadi cerminan dari konsistensi ide kebhinekaan. Tulisan ini dapat menjadi setidaknya suatu timbangan bagaimana posisi mayoritas di satu wilayah di Indonesia bertindak terhadap minoritas. Sikap ini dapat memberikan cerminan dari sikap toleran atau intoleran. Meskipun contoh yang diambil terjadi di pulau Jawa dengan Islam sebagai mayoritas, tulisan ini berusaha menganalisis bahwa tindakan yang dianggap kurang bersahabat terhadap minoritas, bukanlah *mainstream* dalam sikap mayoritas. Artinya hanya terdapat kelompok kecil dari kelompok besar mayoritas yang terkadang kurang toleran terhadap minoritas. Penulis berusaha memberikan contoh dari kasus pendirian Gereja di Sragen yang *secara yuridis belum berizin sesuai PBM No. 8 dan 9 Tahun 2006 karena gereja ini sudah ada sejak tahun 1990. Selanjutnya, penulis berargumen bahwa, tuduhan Laskar Umat Islam Surakarta bahwa gereja tersebut meresahkan warga tidak terbukti. Tulisan ini setidaknya memberikan dorongan pentingnya bukti yuridis dan sosiologis dalam menangani konflik-konflik yang terjadi di masyarakat antara kelompok mayoritas dan minoritas.*

Tulisan selanjutnya berkaitan dengan diskursus azan dalam konteks fikih dan budaya yang ditulis oleh Ahmad Munif. Munif berusaha untuk memberikan gambaran tentang akulturasi ajaran fikih Islam dengan budaya masyarakat setempat dalam kaitannya dengan cara melakukan ibadah salat. Panggilan azan yang merupakan medium untuk salat berjamaah, bagi masyarakat di suatu daerah menjadi penting dalam kaitannya dengan tanda untuk berkumpul. Secara sosiologi budaya, bagi beberapa daerah yang bukan kota besar, akulturasi fikih dan budaya setempat

memberikan penguatan bagi eksistensi masyarakat dalam kaitannya dengan pelaksanaan agama dan kehidupan sosial budaya.

Tulisan selanjutnya dari Farida Hanun membincangkan diskursus madrasah unggulan. Topik ini memang selalu menjadi topik aktual untuk dibahas, terutama dalam kondisi dimana kualitas sekolah-sekolah Islam belum dapat berkompetisi secara ketat dengan sekolah-sekolah lain. Kebutuhan akan sekolah unggulan yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan tangguh secara mental, spiritual dan pikir dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi merupakan cita-cita dari setiap pendidik. Tulisan Hanun tentang pentingnya evaluasi terhadap penyelenggaraan madrasah unggulan terkait input, proses dan produk dengan mengambil contoh di MIN Serawi Kalimantan Selatan, sesungguhnya dapat menjadi pengingat tentang pentingnya evaluasi terhadap kemajuan suatu sekolah terlepas apakah sekolah tersebut telah dianggap unggulan, maju atau bahkan belum. Kemunduran suatu insitusi pendidikan biasanya dimulai ketika sang pengelola telah puas dengan pencapaian yang dianggap tinggi.

Selanjutnya, tulisan yang masih terkait dengan pendidikan dan sekolah dengan fokus kompetensi guru bahasa Arab dapat dilihat dari tulisan selanjutnya dari Neneng yang menyoroti pentingnya kompetensi guru dalam kaitannya dengan minat siswa dalam belajar Bahasa Arab. Contoh yang diambil adalah kasus siswa Kelas IX yang tersebar di 9 Madrasah Tsanawiyah di Kecamatan Kebayoran Lama. Meskipun contoh yang diambil adalah siswa sekolah menengah, namun pola yang penting untuk dicermati dan dipertimbangkan secara serius adalah kenyataan bahwa kompetensi guru memiliki kaitan erat dengan minat belajar. Hal ini sesungguhnya dapat diterapkan untuk segala jenjang pendidikan secara khusus dan bahkan untuk kehidupan secara umum. Artinya keberhasilan pendidikan tidak hanya terkait dengan hebatnya sistem, tetapi juga hebatnya sang pendidik. Sistem yang hebat juga seringkali tidak dapat menghasilkan anak didik yang hebat bila pendidiknya tidak hebat.

Terakhir dari tulisan yang ada adalah tulisan Vilya Lakstian yang masih terkait dengan pendidikan. Dalam tulisannya tentang strategi membaca teks dan kepedulian anak terhadap

lingkungan sosial, Vilya menekankan pentingnya guru sebagai pihak yang berperan penting sebagai penghubung berbagai aspek yang dibawa teks kepada para siswanya. Senada dengan tulisan Neneng, analisis Vilya menekankan pentingnya kemampuan guru yang mumpuni untuk menghubungkan kemampuan intelegensi anak dalam memahami teks dan kemampuan emosional anak dalam mengaktualisasikan teks pada kehidupan sosial anak.

Keseluruhan tulisan dalam jurnal ini diharapkan dapat memberikan inspirasi yang akan menggugah pembaca dalam meningkatkan kepekaan dan minat untuk mengembangkan kehidupan sosial keagamaan yang lebih baik untuk Indonesia di masa depan dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Semoga tulisan-tulisan dalam Dialog kali ini bermanfaat bagi pembaca. Selamat membaca!

## UCAPAN TERIMAKASIH (ACKNOWLEDGEMENT)

---

Kami segenap Redaksi DIALOG Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan mengucapkan terimakasih kepada Mitra Bestari yang senantiasa terlibat aktif dalam proses telaah dan saran perbaikan untuk penerbitan Jurnal DIALOG yang berkualitas:

Prof. Mark Woodward (Australian National University)

Prof. Robert Hefner (Boston University)

Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, M.A. (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Prof. Dr. Muhammad Hisyam (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

Prof. Dr. Masykuri Abdillah, M.A. (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar, M.A. (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Prof. Dr. Iik Arifin Mansurnoor (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Saiful Umam, Ph.D. (Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

# DAFTAR ISI

---

ISSN : 0126-396X

**Jurnal DIALOG**  
**Vol. 40, No. 1, Juni 2017**

**ABDUL JALIL**

Komunikasi Budaya: Suatu Tinjauan Antropologi Penggunaan Tangan Kiri pada Masyarakat di Sekitar Kampus Perak: 1-10

**MUSTOLEHUDIN**

Dinamika Peribadatan Gereja Injili di Indonesia Pasca Konflik Tolikara: Studi Kasus di Desa Mojokerto Kecamatan Kedawung Wetan: 11-20

**VILYA LAKSTIAN CATRA MULIA**

Strategi dan Keutuhan Teks Bacaan dalam Mengoptimalkan Kepedulian Anak Terhadap Lingkungan Sosial: 21-34

**FARIDA HANUN**

Evaluasi Penyelenggaraan Madrasah Unggulan: Studi Kasus di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Serawi Kalimantan Selatan: 35-46

**AHMAD MUNIF**

Dialog Fikih dan Budaya dalam Kumandang Azan: 47-56

**NENENG LM**

Pengaruh Kompetensi Guru Bahasa Arab dan Minat Belajar Siswa terhadap Hasil Belajar Bahasa Arab Siswa Kelas IX MTs di Kecamatan Kebayoran Lama : 57-68

**FIRMAN NUGRAHA**

Demokrasi dan Perda Syariat: Kasus Sukabumi: 69-84

**ANA SABHANA AZMY**

Kompatibilitas Islam dan Demokrasi: Telaah atas Pandangan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap Islam dan Demokrasi: 85-94

**GAZI SALOOM**

Dukungan terhadap Kekerasan: Menguji Identitas Sosial dan Persepsi Keterancaman: 95-110

**BOOK REVIEW**

**FATHUROZI**

Menolak Kekerasan Identitas Tunggal: 111-110



# THE COMPATIBILITY OF ISLAM TO DEMOCRACY: AN ANALYSIS OF HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) VIEW ON ISLAM AND DEMOCRACY

ANA SABHANA AZMY\*)

---

## ABSTRACT

*Fundamentalist Islamic groups are often identified as resistant groups towards revolutionary values coming from the West. In Indonesian context, fundamentalist groups was represented by, one of them, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Fundamentally, HTI as a group opposes any changes and supports the establishment of Islamic nation. From this perspective, HTI is against democracy as a product of western thought. In fact, HTI is struggling for the unity Islamic ummah under khilafah islamiyyah by khalifah as a leader. From this background this paper aims at answering to questions. First, how is HTI view as a fundamentalist group on the compatibility of Islam to democracy? Second, Is Islam compatible with democracy?*

**KEY WORDS:** HTI, Democracy, Compatibility, Islam

## KOMPATIBILITAS ISLAM DAN DEMOKRASI: TELAAH ATAS PANDANGAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) TERHADAP ISLAM DAN DEMOKRASI

## ABSTRAK

Kelompok Islam fundamentalis seringkali dicirikan sebagai kelompok yang resisten terhadap hal-hal baru dan nilai-nilai yang diusung dari Barat. Pada konteks ke-Indonesiaan, hadir Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang merupakan representatif dari kelompok ini. Pada dasarnya, HTI sebagai kelompok yang menentang perubahan dan hal baru, menginginkan terwujudnya kehidupan Islam. Atas pemikiran tersebut, maka HTI menentang hadirnya demokrasi sebagai suatu hal yang datang dari Barat. HTI justru menginginkan bersatunya kembali umat Islam yang saat ini terpisah, di bawah naungan khilafah Islamiyyah dengan seorang khalifah sebagai pemimpinnya. Atas pandangan ini, maka ada dua hal yang ingin dijawab dalam tulisan ini, yaitu Pertama; bagaimana pandangan HTI sebagai kelompok fundamentalis terhadap kompatibilitas Islam dan demokrasi? Kedua; apakah pada kenyataannya Islam kompatibel dengan demokrasi?

**KATA KUNCI:** Islam dan Demokrasi, Hizbut Tahrir Indonesia

---

\*) Dosen Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Alamat Instansi: Jl. Kertamukti No.5 Pisangan, Ciputat 15419. Email: [hana.azmy86@gmail.com](mailto:hana.azmy86@gmail.com)

\*\* Naskah diterima April 2017, direvisi Mei 2017 dan diestujui untuk diterbitkan Juni 2017

## A. PENDAHULUAN

Sejak awal tahun 1970-an, ketika gelombang sejarah ketiga atas demokratisasi mulai, dunia muslim atau lebih dititik beratkan pada keintian Arab, telah dilihat hanya mempunyai signifikansi kecil atas bukti peningkatan dalam keterbukaan politik, penghormatan pada hak asasi manusia, kebebasan pers dan transparansi.<sup>1</sup> Gap demokrasi yang disebutkan oleh Azyumardi juga dinyatakan dalam data bahwa dari 192 negara di dunia saat ini, 121 diantaranya mengadakan pemilihan secara demokratis. Namun, di sebuah negara dengan muslim sebagai mayoritas, hanya sebelas dari empat puluh tujuh (atau dua puluh tiga persen) mempunyai pemerintahan pemilihan secara demokratis. Bagaimanapun, secara kontras laporan ini juga menyebutkan bahwa ada beberapa 'titik cerah' dari demokrasi secara bilangan utama dan setidaknya negara Muslim Arabisasi seperti Albania, Bangladesh, Turkey, Iran dan juga Indonesia di dalamnya. Meskipun hal ini ada dalam fondasi yang goyah, dan pengembangan, fermentasi demokrasi di sadari dalam negara-negara tersebut.<sup>2</sup>

Jika melihat pada fenomena yang ada, sebuah pertanyaan selalu hadir dalam tataran fakta antara Islam dan Demokrasi. Yaitu apakah Islam kompatibel dengan demokrasi sebagaimana yang terjadi dalam kebanyakan negara Islam? Bagaimanapun, catatan Freedom House meyakini bahwa sejarah saat ini menunjukkan bahwa Islam bukanlah secara inheren tidak kompatibel dengan demokrasi dan nilai-nilai demokratis. Jika diamati, negara-negara dengan penduduk muslim mayoritas seperti Bangladesh, Turkey dan Indonesia, hidup secara demokratis di bawah pemerintahan yang menganut nilai-nilai demokratik. Hal ini menunjukkan bahwa ada harapan untuk sebuah demokrasi dalam dunia muslim.<sup>3</sup>

Indonesia yang menganut negara demokrasi dan mempunyai populasi penduduk mayoritas muslim, telah menjalankan pemerintahan demokratis ini semenjak reformasi bergulir di tahun 1998. Terbukti dengan adanya gerakan reformasi dan penetapan negara

demokrasi, kebebasan berpendapat, berbicara dan berekspresi telah diakui sampai saat ini. Meski demikian, harus dipahami bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim mempunyai berbagai kelompok, seperti kelompok moderat (yang diwakili oleh NU/ Muhammadiyah), fundamentalis radikal Islam serta militan Islam (yang diwakili oleh HTI, FPI atau JI). Salah satunya adalah kelompok fundamentalis Islam yang diwakili oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dalam aksinya, kelompok ini mengusung negara Islam/ kekhalifahan sebagai bentuk pemerintahan di Indonesia. HTI sebagai kelompok fundamentalis Islam juga menolak nilai-nilai baru yang diadaptasi dari barat, termasuk demokrasi.

Nilai-nilai demokratis yang mengusung sebuah kebebasan (*freedom*), keadilan (*justice*), pengakuan atas hak (*rights*) dan kesetaraan (*equality*) bagi tiap orang, dikatakan oleh HTI tidak sesuai dengan Islam. Islam mempunyai sistemnya sendiri.<sup>4</sup> Istilah fundamentalisme sendiri ditolak oleh Muhammad Imarah, seorang pemikir terkenal dari Mesir dan dunia Arab. Menurutnya, istilah fundamentalisme tidak dikenal dalam pemikiran Arab dan Islam. Ia merupakan produk pemikiran Barat yang berawal dari gerakan Kristen Protestan Amerika yang menafsirkan injil secara literal dengan menolak penakwilan. Menurutnya, sebutan Islamis lebih tepat untuk orang-orang yang menyeru pada keislaman. Ia juga menangkis pemikiran Roger Graudy yang menempatkan fundamentalisme pada gerakan Islam kontemporer.<sup>5</sup> Meski demikian, istilah fundamentalisme yang dipakai dan dilabelkan pada kelompok Islam di Indonesia, adalah sebuah kelompok yang menentang perubahan dan nilai demokrasi serta menginginkan sistem khilafah. Dengan kata lain, HTI menginginkan Islam menjadi sistem politik. Penolakan HTI terhadap demokrasi, bisa dilihat dalam berbagai demonstrasi yang terjadi di Indonesia.

## B. LATAR BELAKANG MASALAH

Kelompok Islam fundamentalis kerap kali dicirikan sebagai kelompok yang resisten

<sup>1</sup> Azyumardi Azra, *Indonesia, Islam and Democracy: dynamics in a global context*, Solstice Publishing with the support of The Asia Foundation: Jakarta, 2006, hal.3-4.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal.4.

<sup>3</sup> *Ibid*, hal.4.

<sup>4</sup> <http://www.mediaumat.com/news-dalam-negeri/2060-omong-kosong-demokrasi-aksi-hti-tolak-obama-dihadang-.html>

<sup>5</sup> Disadur dari buku Muhammad Imarah, *Fundamentalisme dalam Perspektif Pemikiran Barat dan Islam*, Gema Insani: Jakarta, 1999.



terhadap hal-hal baru dan nilai-nilai yang diusung dari Barat. Gagasan dasar fundamentalisme seperti yang dipaparkan oleh Gelner adalah bahwa suatu agama tertentu dipegang kokoh dalam bentuk literal (harfiah) dan bulat, tanpa kompromi, pelunakan, reinterpretasi dan pengurangan.<sup>6</sup> Dalam konteks ke-Indonesiaan, kita dapat melihat HTI sebagai representatif dari kelompok ini. Beberapa aksi demonstrasi HTI yang ditunjukkan pada khalayak mencerminkan bahwa Islam seharusnya menjadi sebuah sistem pemerintahan. Salah satu contohnya adalah demonstrasi atas kedatangan Obama pada bulan November 2010. HTI mengatakan bahwa dengan berlindung di bawah kata demokrasi, maka pemerintahan Indonesia bersedia bekerjasama dengan Obama yang kebijakannya tidak berbeda dengan presiden sebelumnya, yaitu Bush.

*"Dua hal prinsipil masih dilakukan oleh Obama seperti Bush dan presiden Amerika lainnya : pembunuhan umat Islam dan perampokan kekayaan alam dunia Islam termasuk Indonesia !"*<sup>7</sup> *"Obama, Obama, usir, usir. Amerika, Amerika, hancurkan, hancurkan. Khilafah, khilafah, tegakkan, tegakkan!" Berbagai spanduk digelar dan berbunyi: 'Obama, the real terrorist', 'Menu favorit Obama, Sate! Dagingnya kaum Muslimin di Irak dan Afghanistan, kecapnya ExxonMobil, ditusuk dengan M16, dibakar ala US Army'.*<sup>8</sup>

HTI meyakini bahwa kerjasama dengan pihak Barat tidak akan memberikan keuntungan, karena Barat lah penyebab dari kehancuran Islam. Demokrasi yang diyakini sebagai sistem pemerintahan yang memberikan keleluasaan dan kewenangan terhadap rakyat, dinilai HTI tidak sesuai dengan nilai yang dianut oleh Islam. Ada berbagai pandangan tokoh dan teoritis mengenai substansi inti dari demokrasi. Pemahaman akan konteks makna inti dari demokrasi, seperti yang dikatakan oleh Seymour Martin Lipset bahwa

<sup>6</sup> Ernest Gellner, *Post Modernism, Reason and Religion*, London:1992, dalam buku Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme*, PARAMADINA: Jakarta, 2006, hal. 108.

<sup>7</sup> Disadur dari perkataan salah seorang demonstran HTI terhadap kedatangan Obama pada bulan November 2010.

<sup>8</sup> Teriakan demonstran atas kedatangan Obama, dan menginginkan sistem khilafah di tegakkan di Indonesia. diambil dari <http://www.mediaumat.com/news-dalam-negeri/2060-omong-kosong-demokrasi-aksi-hti-tolak-obama-dihadang-.html>.

demokrasi adalah "a political system which supplies regular constitutional opportunities for changing the governing officials, and a social mechanism which permits the largest possible part of the population to influence major decisions by choosing among contenders for political office". Sedangkan Robert Dahl, menekankan proses pemilihan secara umum dalam sebuah tatanan demokrasi.<sup>9</sup>

Pada dasarnya, Hizbut Tahrir sebagai kelompok yang menentang terhadap perubahan dan sesuatu baru, yang keluar dari teks ke-Islaman, menginginkan keterwujudan dari kehidupan Islam tersebut. Kehidupan Islam ini dicirikan dengan dua hal. Pertama, kehidupan yang didalamnya diterapkan syariat Islam dalam seluruh sendi kehidupan, baik pribadi, keluarga dan masyarakat dan bernegara. Kedua, bersatunya kembali ummat Islam yang kini bercerai dalam lebih dari 50 negara, di bawah naungan khilafah Islamiyah dengan seorang khalifah sebagai pemimpinnya.<sup>10</sup> Kedua faktor ini mencerminkan bahwa tatanan demokrasi yang merupakan kedaulatan rakyat, tidak ada dalam pemahaman HTI. Jika HTI menginginkan sistem khilafah pada konteks kekinian, apa dengan didirikannya negara khilafah lantas umat Islam terjamin hidup damai? Bagaimana dengan hak tiap negara untuk menentukan masing-masing sistem pemerintahannya sesuai dengan kebutuhan rakyatnya?

Atas keinginan HTI mendirikan negara khilafah Islamiyyah dan menentang nilai-nilai Barat, di mana hal ini selalu dicetuskan dalam tiap aksi demonstrasinya, maka ada dua pertanyaan yang ingin dijawab dalam tulisan ini. *Pertama*, bagaimana pandangan HTI sebagai kelompok fundamentalis terhadap kompatibilitas Islam dan Demokrasi? *Kedua*, apakah pada kenyataannya Islam kompatibel dengan demokrasi?

### C. LANDASAN TEORITIK

Dalam menganalisa pandangan HTI terhadap kompatibilitas Islam dan Demokrasi, ada beberapa teori yang akan di gunakan, yaitu Fundamentalisme Islam sebagai kelompok muslim

<sup>9</sup> Ali Reza Abootalebi, *Islam and Democracy: state-society relations in developing countries, 1980-1994*, Garland Publishing: New York, 2000, hal.34.

<sup>10</sup> Berdasarkan paparan Ismail Yusanto (Juru Bicara HTI) dalam wawancara dengan media *Tsaqofah*, yang diakses dari <http://khilafahislam.multiply.com/journal/item/60>.

& Islam dan Demokrasi. Allan Samson dalam bukunya *Conceptions of Politics, Power and Ideology in Contemporary Indonesian Islam* mencatat munculnya orientasi fundamentalis, reformis dan akomodasionis dalam kelompok-kelompok Muslim. Dalam paparannya, “kelompok fundamentalis mendukung jenis penafsiran atas Islam yang kaku dan murni, menentang pemikiran sekular, pengaruh Barat dan sinkretisme kepercayaan tradisional, dan menekankan keutamaan agama atas politik. Sedangkan reformis juga menekankan keutamaan agama atas politik, tetapi mereka jauh lebih mau bekerjasama dengan kelompok-kelompok sekular atas landasan yang sama-sama disepakati dibandingkan dengan kelompok fundamentalis”.<sup>11</sup> Menurut Martin E Marty dan R Scott Appleby, fundamentalism adalah “contemporary militant and political religious movements which have organized in reaction to the prevailing patterns of modernization in their respective societies”.<sup>12</sup>

Demokrasi menurut David Held adalah mengkombinasikan wawasan liberal dan tradisi Marxis supaya mencapai arti dari demokrasi yang mendukung prinsip utama dari otonomi;

*Persons should enjoy equal rights and, accordingly, equal obligations in the specification of the political framework which generates and limits the opportunities available to them; that is, they should be free and equal in the determination of the conditions of their own lives, so long as they do not deploy this framework to negate the rights of others.*<sup>13</sup>

Dengan demikian, hak yang setara dan kebebasan adalah merupakan inti dari demokrasi, selama hak dan kebebasan tersebut tidak mengganggu hak orang lainnya.

Sedangkan dalam tulisannya, *Islam and Democracy: Is Modernization a Barrier?* John O voll memaparkan ada juga kaum konservatif yang memandang bahwa sebenarnya Islam kompatibel dengan demokrasi. Badan resmi Al-Azhar

menyimpulkan deskripsi dari Al-Qur’an yang menyebutkan bahwa ayat Al-Qur’an berhubungan dengan kehidupan sosial politik. Ahmad Sawqi al Fanjari, penulis dari Mesir mengkompilasikan daftar dari hak-hak demokratik dan dan kebebasan yang ditemukan dalam tulisan para muslim masa terdahulu dan menyimpulkan bahwa “apa yang disebutkan kebebasan dalam Eropa, adalah apa yang didefinisikan dalam agama kita sebagai keadilan (*justice/al ‘adlu*), *right* (haqq), *consultation* (shura), and *equality* (musawaat).<sup>14</sup>

#### D. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Hizbut Tahrir secara inisial di dirikan di Yordania pada tahun 1952 oleh Shaykh Taqi al Din al Nabhani dan mulai menyebar di Indonesia di awal tahun 1980-an. Pergerakan HTI lebih menonjol di Indonesia sejak jatuhnya pemerintahan Soeharto. Secara terbuka, HTI menyerukan pada sistem khalifah secara universal. Pergerakan ini mengadakan internasional konferensi atas khalifah di Jakarta pada awal tahun 2000. Meski konferensi internasional ini mengundang beberapa tokoh yang menonjol di Hizbut Tahrir dari luar negeri, namun tidak banyak kalangan muslim lokal yang menghadiri acara tersebut.<sup>15</sup> Selanjutnya, HTI membuat dirinya lebih terlihat, militant dan vocal dengan demonstrasi-demonstrasi yang dilakukannya. Sebagai contoh saat itu dengan memprotes kebijakan pemerintahan pada masa Abdurrahman Wahid (GusDur) yang membuka hubungan perdagangan antara Indonesia dan Israel. Tidak hanya itu, HTI juga berdemonstrasi tentang kenaikan bahan bakar pada era pemerintahan Megawati dan demonstrasi terluasnya adalah ketika mengancam operasi militer AS di Afghanistan setelah peristiwa 11 September (penyerangan terhadap *World Trade Center*).

#### 1. Pandangan HTI terhadap Keterikaitan Islam dan Demokrasi

HTI berpendapat bahwa AS adalah master dari ide konspirasi Barat yang ingin menghancurkan Islam dan Muslim.<sup>16</sup>

<sup>11</sup> Allan Samson, *Conceptions of Politics, Power and Ideology in Contemporary Indonesian Islam*, hal.199-200 dalam buku Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara*, PARAMADINA: Jakarta, 2009, hal.43. lihat juga buku Azyumardi Azra mengenai pemaparan fundamentalisme dalam Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme*, PARAMADINA: Jakarta, 1996, hal. 109.

<sup>12</sup> Martin E Marty dan R Scott Appleby, *Fundamentalism Comprehended*, The University of Chicago Press: London, 1995, hal.1.

<sup>13</sup> David Held, *Models of Democracy*, UK: Polity Press, reprinted 2000, hal.301

<sup>14</sup> *Ibid*, hal.174.

<sup>15</sup> Azyumardi Azra, *Indonesia, Islam and Democracy: dynamics in a global context*, Solstice Publishing with the support of The Asia Foundation: Jakarta, 2006, hal.10.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal.10

Ketidakpercayaan HTI terhadap demokrasi dan menginginkan sistem khilafah, berawal dari gagasan terwujudnya kehidupan Islam. HTI berpendapat bahwa demokrasi itu intinya 'kedaulatan di tangan rakyat'. Yang dimaksud kedaulatan di situ adalah *yamlikul iradah* atau yang "memiliki kehendak paling tinggi", kemana seluruh rakyat dan seluruh elemen negara tunduk. Dalam konteks negara modern sekarang ini kedaulatan rakyat diwujudkan melalui wakil rakyat yang duduk di parlemen. Dalam parlemen, para wakil rakyat itu berhak menetapkan undang-undang. Dalam proses legislasi ini, wakil rakyat itu diasumsikan sebagai orang yang memiliki wisdom atau kebijaksanaan, bahwa mereka akan mengambil keputusan dan membuat hukum yang terbaik. Makanya kemudian ada adagium terkenal *Vox populi vox dei* (suara rakyat adalah suara Tuhan). Namun faktanya tidak selalu demikian.<sup>17</sup> Sebagai kelompok Islam fundamentalis, HTI memang mengartikan ayat Al-Qur'an secara tekstual dan tidak menerima pengaruh sekular Barat, juga penafsiran lain selain yang mereka maksudkan, seperti dikatakan oleh Allan Samson.

Martin E Marty pun memberikan sebuah kerangka pemahaman dari ciri fundamentalisme, yang bisa kita lihat dalam kelompok fundamentalisme Islam. Prinsip **pertama** fundamentalisme adalah paham perlawanan. Fundamentalisme dalam agama manapun mengambil bentuk perlawanan, yang bahkan sering radikal terhadap ancaman yang membahayakan eksistensi agama, termasuk nilai-nilai Barat/ modernitas. **Kedua**, penolakan terhadap hermeunetika. Mereka menolak sikap kritis terhadap teks dan interprestasinya. Teks Al-Qur'an harus di lihat secara literal. **Ketiga**, penolakan terhadap pluralisme dan relativisme. Bagi mereka, pluralisme merupakan hasil pemahaman yang keliru terhadap teks kitab suci. **Keempat**, penolakan terhadap perkembangan historis dan sosiologis. Mereka beranggapan bahwa kedua hal itu telah membawa manusia semakin jauh dari doktrin literal kitab suci.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Dalam paparan wawancara antara media Tsaqafah dan Ismail Yusanto (Juru Bicara HTI), diakses dari <http://khilafahislam.multiply.com/journal/item/60>.

<sup>18</sup> Martin E Marty, *What is Fundamentalism? Theological Perspective* dalam buku Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme*, PARAMADINA: Jakarta, 2006, hal.109-110.

Menurut HTI, kehendak paling tinggi adalah Allah dan Rasul-Nya, atau dalam bahasa yang lebih simple adalah syariat. Syariat menurut mereka semestinya bukan *option* (pilihan), tapi *obligation* (kewajiban).<sup>19</sup> Dalam sistem demokrasi di negeri-negeri muslim termasuk Indonesia, syariat itu masih sekadar *option*, bukan *obligation*. Di sinilah HTI menolak demokrasi, karena syariat itu merupakan kewajiban, bukan pilihan, yang semestinya diterapkan sebagai satu-satunya sistem hukum yang mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sebagai kelompok Islam yang menafsirkan Al-Qur'an secara kaku dan murni, dengan indikator beberapa penafsiran Al-Qur'an, seperti "*jaahidil kuffaar wal musyrikuun*", adalah dengan memerangi/berdemonstrasi terhadap Barat dan sama sekali tidak menerima pandangan apapun dari Barat. Pandangan HTI yang tidak menyetujui adanya sistem demokrasi dan mengartikan ayat Al-Qur'an secara harfiah, menyebabkan Islam di pahami sebagai agama yang kaku. Jika kita pahami, Al-Qur'an adalah nilai-nilai pedoman yang harus menjadi acuan dalam hidup manusia. Jika konteks demokrasi dalam arti kontemporer merupakan pengusungan atas kebebasan, pemenuhan hak dan kesetaraan, maka Islam telah mengajarkan nilai-nilai tersebut sejak dahulu. Penolakan atas penafsiran non tekstual, menjadikan HTI sebagai kelompok Islam fundamentalis menjelma dalam komitmen yang tinggi tidak hanya untuk mentransformasi kehidupan individual, tetapi sekaligus komunal dan sosial. Karena itu, fundamentalisme Islam juga sering bersifat eksoteris, yang sangat menekankan batas-batas kebolehan dan keharaman berdasarkan fiqh.<sup>20</sup>

Dalam tataran real, agama memegang peranan penting dalam sebuah kehidupan masyarakat, termasuk juga bagi berbagai kelompok Islam, seperti HTI. Pandangan mereka bahwa syari'at adalah kehendak Allah dan Rasul, karena itu harus di taati dan bukan dipilih, adalah refleksi bahwa agama (dalam hal ini Islam), adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar, dan harus dijalankan berdasarkan apa yang termaktub dalam Al-Qur'an.

<sup>19</sup> *Ibid*, <http://khilafahislam.multiply.com/journal/item/60>,

<sup>20</sup> Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme*, PARAMADINA: Jakarta, 2006, hal. 108.

Emile Durkheim dalam tulisannya *The elementary forms of the religious life* menyatakan bahwa agama menyediakan fungsi general untuk masyarakat, menciptakan solidaritas antar anggota-anggotanya, yang mana hal itu adalah penting untuk kelangsungan hidup kelompok manapun. Dalam kata lain, adalah tujuan agama untuk mengatur hubungan antar manusia melalui konsep spiritual.<sup>21</sup> Konsep spiritual ini yang sering di definisikan berbeda-beda, terlebih dalam beberapa kelompok Islam, seperti fundamentalis, reformis dan sebagainya. Kelompok fundamentalis mengartikan konsep spiritual, seperti yang termaktub dalam Al-Qur'an, tanpa penafsiran yang lentur. Sedangkan bagi reformis, penafsiran Al-Qur'an senantiasa bersifat kondisional, sesuai keadaan dan kebutuhan umat Muslim, tanpa menyepelkan hakikat agama. HTI tidak setuju jika dikatakan kedaulatan ada di tangan rakyat. Mereka memisahkan antara kekuasaan dengan kedaulatan. Argumen yang disampaikan adalah bahwa kekuasaan memang ditangan rakyat, namun kedaulatan tidak. Pemimpin yang dipilih adalah untuk melaksanakan kedaulatan syari'at dan bukan kedaulatan rakyat. Sehingga kerap kali kita melihat demonstrasi yang diusung oleh HTI adalah menyalahkan pemimpin Indonesia yang tidak menjalankan syari'at Islam, yaitu memerangi kaum musyrik (dimana dalam pandangan mereka adalah orang Barat dan musuh Islam seperti Israel). HTI pun berpendapat bahwa ketika mereka mengadakan unjuk rasa, itu bukan bagian dari demokrasi, namun praktik dari ajaran Islam yang melaksanakan segala sesuatunya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan ummat muslim.

Sistem demokrasi yang dinilai tidak kompatibel dengan Islam oleh HTI, dijawab dengan pemberlakuan sistem khilafah. Menurut HTI, sistem ini mempunyai beberapa keunggulan: **pertama**: menjamin kebenaran yang hakiki, tidak seperti demokrasi. **kedua**, memberi ruang bagi masyarakat untuk berpendapat, memilih pemimpinnya sendiri, berekspresi, mengkritik sesuatu yang keliru. Dan ini tidak sama dengan yang telah diusung oleh sistem demokrasi (yang

menurut mereka berstandar ganda). **Ketiga**, menjamin hak-hak mendasar manusia dan tidak seperti ketika demokrasi diterapkan, di mana banyak pelanggaran HAM terjadi, bahkan oleh AS sendiri. **Keempat**, menjamin kepastian hukum dan persamaan di depan hukum. Syari'ah Islam menjamin ini semua, baik bagi yang muslim dan non muslim. **Kelima**, membuat kebijakan yang pro rakyat. Demokrasi di nilai telah melahirkan hubungan simbiosis mutualisme antara penguasa dan pemilik modal yang merugikan rakyat.<sup>22</sup> Pandangan HTI tersebut, meluruskan pandangan beberapa pihak konservatif yang menyebut Demokrasi tidak kompatibel dengan Islam, seperti yang dipaparkan oleh John O Voll bahwa konsep Islam atas kedaulatan yang absolut adalah pada Tuhan- mereka percaya bahwa ide atas kedaulatan orang dalam demokrasi kontradiktif dengan prinsip kedaulatan absolut tersebut.

Abul-Ala-Mawdudi dalam menjawab kompatibilitas Islam dengan demokrasi mencoba membedakan antara "deen (agama) yang sebagai keyakinan dan praktik dari demokrasi dengan "deen" (Islam). Dalam deen sebagai keyakinan, maka tiap orang bisa meletakkan kedaulatan, yang mana mereka bisa diperintah dengan shari'a yang telah dibingkai oleh mereka. sebaliknya, deen agama Islam adalah bahwa Allah merupakan pemilik kedaulatan yang ada di bumi dan juga manusia. Hanya Allah lah yang harus dihormati dan ditaati sesuai dengan shari'a yang berlaku.<sup>23</sup> Jika HTI sebagai salah satu kelompok Islam fundamentalis yang menolak kompatibilitas Islam dengan Demokrasi, lantas bagaimana sebetulnya relasi Islam dengan Demokrasi?

## 2. Relasi Islam dan Demokrasi dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an telah menyatakan dengan sangat jelas bahwa Islam-pemasrahan diri yang sempurna kepada Allah-adalah satu-satunya keyakinan yang terus menerus diwahyukan Allah kepada ummat manusia sejak awal kejadiannya.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Disadur dari paparan dan pendapat HTI mengenai perbedaan demokrasi dan khilafah, dari <http://hizbut-tahrir.or.id/2010/07/11/khilafah-vs-demokrasi/>.

<sup>23</sup> John O Voll, *Islam and Democracy: Is Modernization a Barrier?*, Religion Compass, Georgetown University, Blackwell Publishing, 2006, hal.172.

<sup>24</sup> Abul A'la Maududi, *Apakah Arti Islam dalam Altaf Gauhar, Tantangan Islam*, PUSTAKA: Bandung, 1982, hal.3.

<sup>21</sup> Pandangan Emile Durkheim dalam Ali Reza Abootalebi, *Islam and Democracy: state-society relations in developing countries, 1980-1994*, Garland Publishing: New York, 2000, hal.57.

Islam bukan hanya sekedar membahas bagaimana agama harus ditaati sesuai prinsip shari'a yang ada, namun adalah juga merupakan "the way of life". Cara hidup inilah yang termaktub dalam berbagai ayat dalam Al-Qur'an, termasuk juga tentang permusyawaratan dan nilai-nilai lain yang merupakan pedoman hidup bagi umat muslim. Sebagai contoh adalah penerapan Hak Asasi Manusia, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan juga musyawarah. Dalam Al-Qur'an surat Al-Hujuraat ayat 13 dikatakan bahwa Allah telah menciptakan manusia semuanya dari seorang laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Tidak ada yang membedakan laki-laki dan perempuan, selain kemuliaan karena ketaqwaannya pada Allah.<sup>25</sup> Dari ayat tersebut, mencerminkan bahwa tidak ada diskriminasi/perbedaan antara laki-laki dan perempuan kecuali ketaqwaannya pada Allah SWT. Namun, konsep kesetaraan yang diusung dalam agama Islam ini, jauh lebih dulu daripada konsep demokrasi yang lahir dari tatanan nilai-nilai Barat. Indikator atas hal ini bisa kita lihat bahwa hak pilih perempuan di AS sebagai negara demokratis, baru dimulai pada tahun 1970-an. Dari hal ini kita dapat melihat bahwa konsep demokrasi pada zaman dulu, belum mengusung kebebasan memilih dan berpendapat seperti yang telah diajarkan dalam Islam.

Selanjutnya mengenai musyawarah, termaktub dalam Qur'an surat **Asy Syuura ayat 38**, bahwa bagi orang-orang yang menerima seruan Tuhan dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka dengan musyawarah antar mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang telah diberikan Allah SWT.<sup>26</sup> Ayat lainnya seperti termaktub dalam surat Ali 'Imran ayat 159, bahwa pemberian maaf dan bermusyawarah adalah jalan keluar dari sebuah urusan, seperti peperangan dan hal duniawiah (politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lainnya).<sup>27</sup> Tiga ayat tersebut mencerminkan bagaimana Islam telah mengatur

---

<sup>25</sup> Untuk lebih lengkapnya silahkan lihat Qur'an Surat Al-Hujuraat ayat 13 (manusia diciptakan berbagai bangsa untuk saling mengenal).

<sup>26</sup> Untuk lebih lengkapnya silahkan lihat Qur'an Surat AsySyuura ayat 38 (kewajiban bermusyawarah tentang masalah keduniaan).

<sup>27</sup> Untuk lebih lengkapnya silahkan lihat Qur'an Surat Ali 'Imran ayat 159 (akhlak dan beberapa sifat Nabi Muhammad SAW).

masalah keduniawian yang juga tercermin dalam sistem demokrasi. Dimana David Held dalam bukunya *Models of Democracy* mengemukakan bahwa dalam sistem demokrasi, tiap orang harus mendapatkan hak yang setara. Sehingga dengan demikian, dari pemaparan ini menunjukkan bahwa Islam kompatibel dengan demokrasi kekinian.

Dalam sebuah sistem demokrasi, ada hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyatnya. Seorang pemimpin harus memperhatikan rakyatnya, begitupun rakyat mematuhi pemimpin. Ibnu Taimiyah mengungkapkan pandangannya mengenai relasi ini, bahwa kepatuhan pada pemimpin adalah wajib selama tidak bertentangan dengan shari'ah. Ia mengajukan bentuk prinsip persamaan antara pemerintah dengan masyarakat. Ia menggambarkan bahwa pemerintah adalah pelayan masyarakat.<sup>28</sup>

Dalam tulisannya, *Islam and Democracy: Is Modernization a Barrier?* John O voll memaparkan bahwa muslim konservatif berpendapat bahwa antara Islam dan demokrasi adalah tidak kompatibel karena dua hal. Pertama, konsep Islam atas kedaulatan yang absolut atas Tuhan-mereka percaya bahwa ide atas kedaulatan orang dalam demokrasi kontradiktif dengan prinsip fundamental ini. Kedua, dalam Islam, hukum didefinisikan dan diajarkan oleh Tuhan dan itu hukum Tuhan, Shari'a tidak bisa diubah dengan pemilihan parlemen dan ketiga konsep parlemen sebagai sumber dari hukum dilihat sebagai sesuatu yang menghina.<sup>29</sup> Meski demikian, ada juga muslim konservatif yang berpandangan sebaliknya.

Ada beberapa prinsip yang bisa kita lihat dalam Islam dan relevansinya dengan demokrasi. Pertama, adalah prinsip Tauhid. Prinsip ini merupakan salah satu dasar prinsip dasar dalam pemerintahan Islam. Kedua, prinsip musyawarah. Musyawarah mempunyai makna mengeluarkan pendapat. Dalam menetapkan keputusan bagi masyarakat, paling tidak ada tiga hal yang patut dilihat. 1. Keputusan yang

---

<sup>28</sup> Pandangan Ibnu Taimiyah dalam buku Fazlur Rahman, *Gelombang Perubahan dalam Islam, studi tentang fundamentalisme Islam*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2001, hal.228-229.

<sup>29</sup> John O Voll, *Islam and Democracy: Is Modernization a Barrier?*, Religion Compass, Georgetown University, Blackwell Publishing, 2006, hal.172.

ditetapkan oleh penguasa, 2. Keputusan yang ditetapkan oleh pandangan minoritas, 3. Keputusan yang ditetapkan oleh pandangan mayoritas. Meski demikian, demokrasi tidak identik dengan syuro. Walau syuro membenarkan pandangan mayoritas, namun ini bukanlah suatu yang mutlak, karena pandangan mayoritas dalam syuro tidak boleh menindas minoritas. Suara mayoritas dalam syuro pun tidak boleh berseberangan dengan prinsip-prinsip dasar syari'at.<sup>30</sup> Dua prinsip lainnya adalah **prinsip keadilan** (*al'adaalah*) dan **kebebasan** (*al-hurriyah*), kebebasan yang diusung Islam adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Kompatibilitas ini seperti yang dipaparkan oleh kelompok yang berucap bahwa ada hubungan yang positif antara Islam dan demokrasi. Mereka melihat bahwa ayat Al-Qur'an berhubungan dengan kehidupan sosial politik.

### 3. Keunggulan Nilai Demokratis Islam dari Demokrasi Barat Kontemporer

Islam sebagai pedoman hidup juga mempunyai keunggulan tersendiri atas sistem demokrasi. Sebagai contoh, dalam demokrasi suara mayoritas adalah suara yang diunggulkan/*majority rule*, seperti yang dikatakan oleh Robert Dahl. Dalam bukunya, dipaparkan bahwa apakah proses demokrasi membutuhkan penggunaan prinsip mayoritas. Tiap orang berasumsi bahwa demokrasi pasti membutuhkan aturan mayoritas yang disupport oleh suara mayoritas untuk melewati sebuah hukum.<sup>31</sup> Demokrasi adalah tentang suara mayoritas. Namun, ketika ditanyakan bahwa apakah kebenaran adalah apapun yang diputuskan oleh mayoritas, maka jawabannya adalah tidak.<sup>32</sup>

Dalam demokrasi, suara mayoritas memang diunggulkan, namun ternyata banyak kejadian negatif terjadi karena keagungan suara mayoritas. Sebagai contoh, voting pendapat dalam rapat legislatif yang dihadiri oleh anggota dewan laki-laki dan perempuan untuk membahas masalah anggaran berbasis gender. Anggota dewan laki-laki lebih banyak daripada perempuan dalam menghadiri rapat tersebut, maka ketika

voting terjadi, suara mayoritas laki-laki yang banyak tidak memahami pentingnya anggaran tersebut dinyatakan menang. Hal ini dianggap telah sejalan dengan nilai demokrasi. Kenyataannya, hasil voting tersebut berdampak negatif bagi kepentingan perempuan. Dengan demikian, demokrasi tidak selamanya memberikan dampak positif dan merepresentasikan kepentingan warga negara. Hal ini juga yang menjadikan bahwa sistem syuro dan kebebasan dalam Islam lebih unggul daripada demokrasi. Sebagai contoh, jika atas nama kebebasan dalam sistem demokrasi maka banyak terjadi penyelewengan penggunaan sumber daya alam/ lahan oleh beberapa pengusaha dan *stakeholder*. Dengan berlindung di bawah kata demokrasi, maka mereka bebas dan berhak berinvestasi dan mendirikan gedung diberbagai kota. Pada akhirnya, pendirian gedung tersebut menjadi salah satu penyebab banjir yang merugikan banyak rakyat atas kurangnya daerah resapan air. Kebebasan ini dibatasi dalam konsep Islam, yaitu kebebasan yang bertanggung jawab. Maka, konsep kebebasan dalam Islam bagi tiap orang adalah kebebasan yang tetap memperhatikan masalah ummat. Pada akhirnya, kompatibilitas Islam dan demokrasi di lihat dari semangat dan nilai-nilai yang diterapkan, di mana nilai tersebut telah mengatur bahwa tiap orang berhak mendapatkan kebebasan, pemenuhan hak dan kesetaraan antar sesama dalam hidup.

### E. KESIMPULAN

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai kaum fundamentalis Islam, menolak pada sebuah tatanan nilai Barat. Mereka menentang apapun yang dianggap mengancam eksistensi agama, termasuk modernisasi dan sistem demokrasi. HTI juga tidak menerima penafsiran hermeneutika. Bagi kaum fundamentalis, ayat Al Qur'an harus dimaknai dan dilakukan sesuai dengan apa yang tertera secara harfiah. Sistem demokrasi dianggap oleh mereka menyalahi prinsip shari'a karena meletakkan kedaulatan pada rakyat. Bagi HTI, kedaulatan adalah *yamlikul iradah* atau yang "memiliki kehendak paling tinggi". Kepemilikan ini adalah mutlak kepunyaan Allah dan tidak bisa dialihkan pada manusia. Atas penolakan pada demokrasi, mereka menawarkan sistem khalifah yang lebih mengakomodir kebutuhan ummat

<sup>30</sup> Disadur dari makalah Brigita Win Erwina, *Demokrasi dalam Perspektif Islam*: UII Yogyakarta, 2010, hal.7.

<sup>31</sup> Robert Dahl, *Democracy and It's Critics*, Yale University Press: US, 1989, hal.135.

<sup>32</sup> *Ibid*, hal.

muslim dan dapat menjamin kebenaran hakiki, serta kebebasan berpendapat dan berkespresi yang tidak sama dengan demokrasi karena bagi mereka, demokrasi menerapkan standar ganda. Penolakan atas demokrasi dan nilai-nilai Barat/modernisasi terlihat dalam beberapa demonstrasi HTI yang dilakukan dalam tiap periode pemerintahan dan kebijakan yang diambil pemerintah.

Sedangkan di sisi lain, ayat-ayat Al-Qur'an yang ada, tidaklah bisa diartikan secara tekstual atau harfiah, penafsiran atas Al-Qur'an mengikuti kebutuhan ummat muslim di segala zaman dan kondisi, tanpa menyalahi syari'at Islam. Dalam surat Ali 'Imran, Asy Syuraa dan Al Hujurat sebagai contoh beberapa ayat yang mengusung tata nilai kepemerintahan, maka ditemukan bahwa nilai-nilai Islam adalah kompatibel/sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Beberapa nilai tersebut seperti *justice* (al 'adalah), *freedom* (Al hurriyyah), *rights* (al haq), *equality* (al musaawaa). Semuanya telah diatur dalam Islam sesuai dengan kebutuhan dan penyelesaian masalah ummat di dunia. Bahkan, nilai demokratis Islam telah ada terlebih dahulu di banding nilai demokrasi dari dunia Barat, terbukti dengan tahap pembenahan makna demokrasi Barat dari masa ke masa, yang tidak sama antara saat ini dengan zaman Yunani Kuno.

### **Implikasi Teori**

Dalam melihat pandangan HTI yang tidak menyetujui kompatibilitas Islam dan Demokrasi, harus dilihat dari latar belakang alasan yang dikemukakan. Penyebab bahwa mereka tidak setuju dengan sistem demokrasi adalah karena kaum fundamentalis (HTI) tidak menerima atas penafsiran Islam yang keluar dari tekstual, berpedoman pada nilai Barat dan modernisasi. Bagi mereka sistem yang cocok atas sebuah pemerintahan adalah khilafah, di mana sistem ini lebih unggul dari demokrasi. HTI menganggap kedaulatan itu tetap ada di tangan Tuhan sebagai bentuk dari prinsip syari'ah, seperti yang dipaparkan dalam tulisan John O Voll. Sedangkan dalam sistem demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat. Rakyat memegang kendali. Hal ini tidak masuk dalam nalar mereka dan menjadi tidak mengherankan karena pemahaman akan kedaulatan bagi kelompok HTI, dimaknai dalam bingkai harfiah. Karenanya Islam menjadi tidak

kompatibel dengan demokrasi. Penulis memahami bahwa dalam ayat Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang memberikan pemahaman akan tata nilai pemerintahan yang demokratis. Berbagai ayat menerangkan bahwa tiap orang berhak mendapat hak nya, kebebasan dan kesetaraan dalam hidup. Permasalahan yang terjadi di dunia harus diselesaikan secara musyawarah. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang ada dalam sistem pemerintahan demokrasi. Sehingga teori yang dipaparkan oleh John O Voll yang mengutip pendapat Ahmad Sawqi al Fanjari menjadi relevan, bahwa ia menyimpulkan kebebasan Eropa adalah apa yang didefinisikan dalam agama Islam mengenai keadilan, hak, musyawarah dan kesetaraan. Selain itu, kesetaraan dan kebebasan yang ada dalam Islam, adalah kebebasan yang bertanggung jawab dengan tidak mengganggu orang lain seperti yang dikemukakan David Held akan arti demokrasi.[]

## DAFTAR PUSTAKA

---

- Abootalebi, Ali Reza, *Islam and Democracy: state-society relations in developing countries*, 1980-1994, Garland Publishing: New York, 2000.
- Al-Qur'an Surat Al-Hujuraat ayat 13 (manusia diciptakan berbagai bangsa untuk saling mengenal).
- Al-Qur'an Surat Ali 'Imran ayat 159 (akhlak dan beberapa sifat Nabi Muhammad SAW).
- Al-Qur'an Surat AsySyuura ayat 38 (kewajiban bermusyawarah tentang masalah dunia).
- Azra, Azyumardi, *Indonesia, Islam and Democracy: dynamics in a global context*, Solstice Publishing with the support of The Asia Foundation: Jakarta, 2006.
- Dahl, Robert, *Democracy and Its Critics*, Yale University Press: US, 1989.
- Gellner, Ernest, *Post Modernism, Reason and Religion*, London:1992, dalam buku Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme*, PARAMADINA: Jakarta, 2006.
- Held, David, *Models of Democracy*, UK: Polity Press, reprinted 2000.
- Imarah, Muhammad, *Fundamentalisme dalam Perspektif Pemikiran Barat dan Islam*, Gema Insani: Jakarta, 1999.
- Marty, Martin E dan R Scott Appleby, *Fundamentalism Comprehended*, The University of Chicago Press: London, 1995.
- Marty, Martin E, *What is Fundamentalism? Theological Perspective* dalam buku Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme*, PARAMADINA: Jakarta, 2006.
- Maududi, Abul A'la, *Apakah Arti Islam dalam Alfat Gauhar, Tantangan Islam*, PUSTAKA: Bandung, 1982.
- O Voll, John, *Islam and Democracy: Is Modernization a Barrier?*, Religion Compass, Georgetown University, Blackwell Publishing, 2006.
- Pandangan Ibnu Taimiyah dalam buku Fazlur Rahman, *Gelombang Perubahan dalam Islam, studi tentang fundamentalisme Islam*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2001.
- Samson, Allan, *Conceptions of Politics, Power and Ideology in Contemporary Indonesian Islam*, hal.199-200 dalam buku Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara*, PARAMADINA: Jakarta, 2009.
- Win Erwina, Brigita, *Demokrasi dalam Perspektif Islam*: UII Yogyakarta, 2010.

### INTERNET

- <http://www.mediaumat.com/news-dalam-negeri/2060-omong-kosong-demokrasi-aksi-htitolak-obama-dihadang-.html>.
- <http://khilafahislam.multiply.com/journal/item/60>.
- <http://hizbut-tahrir.or.id/2010/07/11/khilafah-vs-demokrasi/>.



## INDEKS PENULIS

---

### A

#### **Abdul Jalil**

Jurusan Antropologi FIB UHO, alamat: Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonohu Kendari Sulawesi Tenggara Fax (0401) 390006 Telp. (0401) 394061, [abduljalil.uho@gmail.com](mailto:abduljalil.uho@gmail.com)/  
[jalil\\_kaya79@yahoo.co.id](mailto:jalil_kaya79@yahoo.co.id)

“KOMUNIKASI BUDAYA: SUATU TINJAUAN ANTROPOLOGI PENGGUNAAN TANGAN KIRI PADA MASYARAKAT DI SEKITAR KAMPUS PERAK”

Jurnal Dialog Vol. 40, No.1, Juni 2017. hal: 1-10

#### **Ahmad Munif**

Universitas Islam Negeri Walisongo, Jl. Walisongo no. 3-5 Kota Semarang, email: [ahmadmunif@walisongo.ac.id](mailto:ahmadmunif@walisongo.ac.id)

“DIALOG FIKIH DAN BUDAYA DALAM KUMANDANG AZAN”

Jurnal Dialog Vol. 40, No.1, Juni 2017. hal: 47-56

#### **Ana Sabhana Azmy**

Dosen Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Alamat Instansi: Jl. Kertamukti No.5 Pisangan, Ciputat 15419. Email: [hana.azmy86@gmail.com](mailto:hana.azmy86@gmail.com)

“KOMPATIBILITAS ISLAM DAN DEMOKRASI: TELAAH ATAS PANDANGAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) TERHADAP ISLAM DAN DEMOKRASI”

Jurnal Dialog Vol. 40, No.1, Juni 2017. hal: 85-94

### F

#### **Farida Hanun**

Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Jl. MH. Thamrin N0. 6 Jakarta. E-Mail: [farida\\_ridwan@yahoo.com](mailto:farida_ridwan@yahoo.com)

“EVALUASI PENYELENGGARAAN MADRASAH UNGGULAN: STUDI KASUS DI MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI (MIN) SERAWI KALIMANTAN SELATAN”

Jurnal Dialog Vol. 40, No.1, Juni 2017. hal: 34-46

#### **Firman Nugraha**

Balai Diklat Keagamaan Bandung. Jl. Soekarno hatta No. 716 Bandung

“DEMOKRASI DAN PERDA SYARIAT: KASUS SUKABUMI”

Jurnal Dialog Vol. 40, No.1, Juni 2017. hal: 69-84

### G

#### **Gazi Saloom**

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jl. Kertamukti 5 Ciputat. Email : [gazi@uinjkt.ac.id](mailto:gazi@uinjkt.ac.id)

“DUKUNGAN TERHADAP KEKERASAN: MENGUJI IDENTITAS SOSIAL DAN PERSEPSI KETERANCAMAN”

Jurnal Dialog Vol. 40, No.1, Juni 2017. hal: 95-110

## M

### **Mustolehudin**

Balai Litbang Agama Semarang Jl. Untung Suropati Kav 69 – 70 Bampakerep, Ngaliyan, Semarang  
Telepon (024) 7601327, Facs (024) 7611386, Email : [mustolehuddin@gmail.com](mailto:mustolehuddin@gmail.com)

“DINAMIKA PERIBADATAN GEREJA INJILI DI INDONESIA PASCA KONFLIK TOLIKARA:  
STUDI KASUS DI DESA MOJOKERTO KECAMATAN KEDAWUNG SRAGEN”

Jurnal Dialog Vol. 40, No.1, Juni 2017. hal: 11-20

## N

### **Neneng LM**

Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Jl. Ir. H. Juanda Nomor 37 Ciputat, Tangerang  
Selatan. Email: [neneng\\_lm@yahoo.co.id](mailto:neneng_lm@yahoo.co.id)

“PENGARUH KOMPETENSI GURU BAHASA ARAB DAN MINAT BELAJAR SISWA TERHADAP  
HASIL BELAJAR BAHASA ARAB SISWA KELAS IX MTS DI KECAMATAN KEBAYORAN LAMA”

Jurnal Dialog Vol. 40, No.1, Juni 2017. hal: 57-68

## V

### **Vilya Lakstian Catra Mulia**

Dosen Linguistik dan Bahasa Inggris di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi  
Sastra Inggris dan Pendidikan Bahasa Inggris, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Email:  
[vilyalakstian@gmail.com](mailto:vilyalakstian@gmail.com). Alamat: Jl. Maluku No. 12 Keprabon Tengah, Banjarsari, Solo. Nomor  
telepon: 085 628 347 15

“STRATEGI DAN KEUTUHAN TEKS BACAAN DALAM MENGOPTIMALKAN KEPEDULIAN  
ANAK TERHADAP LINGKUNGAN SOSIAL”

Jurnal Dialog Vol. 40, No.1, Juni 2017. hal: 21-34

## KETENTUAN PENULISAN

1. Naskah yang dimuat dalam jurnal ini merupakan hasil penelitian dengan topik masalah sosial dan keagamaan.
2. Naskah belum pernah dimuat atau diterbitkan di media lain.
3. Naskah ditulis dengan kaidah tata Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris yang baku dan benar.
4. Penulis membuat surat pernyataan bahwa naskah yang dikirim adalah asli dan memenuhi persyaratan klirens etik dan etika publikasi ilmiah (bebas dari plagiarisme, fabrikasi, dan falsifikasi) berdasarkan Peraturan Kepala LIPI No. 8 Tahun 2013 dan No.5 Tahun 2014.
5. Apabila naskah ditulis dari hasil penelitian kelompok dan akan diterbitkan sendiri, diharuskan menyertakan surat pernyataan persetujuan tertulis dari anggota kelompok yang lain.
6. Naskah tulisan berisi sekitar 15-20 halaman dengan 1,5 (satu setengah) spasi, kertas kuarto (A 4).
7. Judul ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris maksimal 15 kata menggambarkan isi naskah secara keseluruhan.
8. Judul Bahasa Indonesia ditulis dengan huruf kapital, *bold*, *center*, sedangkan judul Bahasa Inggris ditulis dengan huruf kapital pada awal kata, *italic*, *bold* dan *center*.
9. Nama penulis tanpa gelar akademik diletakkan di tengah (*center*). Nama instansi, alamat instansi, dan email penulis diletakkan dalam satu baris dan di tengah (*center*).
10. Abstrak dan kata kunci dibuat dalam dwi bahasa (Inggris dan Indonesia). Abstrak ditulis dalam satu paragraph, diketik dengan 1 spasi, jenis huruf Palatino Linotype ukuran 11, jumlah kata 150-200 kata. Abstrak Bahasa Inggris diketik dengan menggunakan format *italic*.
11. Abstrak, berisi gambaran singkat keseluruhan naskah mengenai permasalahan, tujuan, metode, hasil, dan rekomendasi kebijakan.
12. Jenis huruf latin untuk penulisan teks adalah Palatino Linotype ukuran 12 dan ukuran 10 untuk catatan kaki.
13. Jenis huruf Arab untuk penulisan teks adalah *Arabic Transparent* atau *Traditional Arabic* ukuran 16 untuk teks dan ukuran 12 untuk catatan kaki.
14. Penulisan kutipan (*footnote*) dan bibliografi berpedoman pada Model Chicago

Contoh:

### **Buku**

Footnote

Satu Penulis

Amanda Collingwood, *Metaphysics and the Public* (Detroit: Zane Press, 1993), 235-38.

Dua Penulis

John B. Christianse and Irene W. Leigh, *Cochlear Implants in Children: Ethics and Choices* (Washington, D.C.: Gallaudet UP, 2002), 45-46.

Artikel pada Jurnal

Footnote

Tom Buchanan. "Between Marx and Coca-Cola: Youth Cultures in Changing European Societies, 1960-1980". *Journal of Contemporary History* 44, no. 2 (2009): 371-373.

Bibliografi

Buku

Satu Penulis

Collingwood, Amanda. *Metaphysics and the Public*. Detroit: Zane Press, 1993.

Dua Penulis

Christianse, John B., and Irene W. Leigh. *Cochlear Implants in Children: Ethics and Choices*. Washington, D.C.: Gallaudet UP, 2002.

*Tiga Penulis*

Venolia, Jean P., Georgio Cordini, and Joseph Hitchcock. *What Makes a Literary Masterpiece*. Chicago: Hudson, 1995.

*Banyak Penulis*

Bailyn, Bernard, et al. *The Great Republic*. Lexington, MA: D.C. Heath, 1977.

*Penulis Anonim*

*Beowulf: A New Prose Translation*. Trans. E. Talbot Donaldson. New York: W.W. Norton, 1966.

*Multi-Volume*

Dorival, Bernard. *Twentieth Century Painters*. Vol 2. New York: Universe Books, 1958.

*Hasil Produksi Editor*

Guernsey, Otis L., Jr., and Jeffrey Sweet, eds. *The Burns Mantle Theatre Yearbook of 1989-90*. New York: Applause, 1990.

*Artikel pada Jurnal*

Buchanan, Tom. "Between Marx and Coca-Cola: Youth Cultures in Changing European Societies, 1960-1980". *Journal of Contemporary History* 44, no. 2 (2009): 371-373.

*Artikel pada Prosiding/Conference Paper*

*Tidak diterbitkan*

Boy, Justin A. "Rainwater Harvesting." Paper presented at the 16<sup>th</sup> Annual Agricultural Conference, Pietersburg University, South Africa, April 8-11, 2003.

*Diterbitkan dan diedit*

Boy, Justin A. "Rainwater Harvesting." In *Proceedings of the 16<sup>th</sup> Annual Agricultural Conference, April 8-11, 2003, Pietersburg University, South Africa*. Edited by Jan Van Riebeek. Pietersburg, South Africa: Pietersburg University Press, 2004.

*Diterbitkan tanpa pengeditan*

Boy, Justin A. "Rainwater Harvesting." In *Agricultural in the North: Are We Making a Difference? Conference Proceeding, April 8-11, 2003*. Pietersburg, South Africa: Pietersburg University Press, 2004.

*Sumber Online*

*Website*

Tice-Deering, Beverly. *English as a Second Language*. <http://www.seattlecentral.org/faculty/bticed> (accessed July, 2005).

University of Chicago Dept. of Romance Languages and Literatures. *Romance Languages and Literature*. <http://humanities.uchicago.edu/romance> (accessed July 27, 2009).

*E-Book*

Thornton, Chris. *Truth from Trash: How Learning Makes Sense*. Cambridge, MA: MIT Press, 2000. <http://emedia.netlibrary.com>.

*E-Journal*

Warr, Mark, and Christophers G. Ellison. "Rethinking Social Reaction to Crime: Personal and Altruistic Fear in Family Households." *American Journal of Sociology* 106, no. 3 (2000): 551-78. <http://www.journals.uchicago.edu/AJS/journal/issues/v106n3/050125/050126.html>. (accessed June 28, 2003),

15. Transliterasi berpedoman pada Pedoman Transliterasi Arab-Latin Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 –Nomor: 0543 b/u/1987.

16. Artikel hasil penelitian memuat judul, nama penulis, alamat instansi, email, abstrak, kata kunci, dan isi. Isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta persentase jumlah halaman sebagai berikut:

- a. **Pendahuluan**, menguraikan latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penelitian (10%)
- b. **Kajian literatur**, menguraikan teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan (15%)

- c. **Metode penelitian**, berisi rancangan/model, sampel dan data, tempat dan waktu, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data (10%)
- d. **Hasil** penelitian dan pembahasan (50%)
- e. **Penutup** yang berisi simpulan dan saran (15%)
- f. **Ucapan terima kasih**
- g. **Daftar Pustaka**. Jumlah sumber acuan dalam satu naskah paling sedikit 10 dan 80% di antaranya merupakan sumber acuan primer dan diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Sumber acuan primer adalah sumber acuan yang langsung merujuk pada bidang ilmiah tertentu, sesuai topik penelitian dapat berupa tulisan dalam makalah ilmiah dalam jurnal internasional maupun nasional terakreditasi, hasil penelitian di dalam disertasi, tesis maupun skripsi

Pemuatan atau penolakan naskah akan diberitahukan secara tertulis/email. Naskah yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis.